



Peran Sumber Daya Manusia dan Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Lokal di Kabupaten Buton Utara

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Hado Hasina ISSN: 2808-1307
hasinaunsultra@gmail.com Vol. 2, No. 3, Desember 2022
Universitas Sulawesi Tenggara <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Maudhy Satyadharna
maudhymaudhy@gmail.com
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hasina, H., & Satyadharna, M. (2022). Peran Sumber Daya Manusia dan Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Lokal di Kabupaten Buton Utara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 217-227.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tentang 5 (lima) aspek yakni konteks berupa kebijakan, tujuan dan sasaran, aspek input, aspek proses, aspek hasil, dan aspek dampak program pembangunan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara selama kurun waktu Tahun 2010-2014 ditinjau dari aspek Peran Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan tujuan program. Data dan informasi dijangkau secara kualitatif dan dianalisa secara kuantitatif dengan instrumen utama adalah kuesioner terbuka serta ditegaskan oleh wawancara kepada informan kunci dan observasi yang memadai. Hasil penelitian disimpulkan bahwa aspek konteks memiliki indeks dengan kategori baik, aspek masukan memiliki indeks dengan kategori cukup baik, aspek proses memiliki indeks dengan kategori cukup baik, aspek produk memiliki indeks dengan kategori baik dan aspek dampak memiliki indeks dengan kategori baik. Komponen yang paling berpengaruh dalam hasil adalah peran SDM berupa inovasi, kompetensi, kreativitas serta peran pemimpin Lembaga Dinas PUTR Kab. Buton Utara dalam menciptakan perubahan baik dalam tim maupun individu dalam organisasi. Penelitian ini juga menemukan budaya kerja yang terbangun adalah menggunakan modal sosial sedangkan dari aspek pendanaan program terdapat kerjasama dengan masyarakat dengan pelibatan serta pemberdayaan masyarakat dengan penelekatan kearifan lokal Sodamparagigi yang bermakna membangun kemitraan dalam pendanaan serta pengenalan penggunaan material lokal (substandard) sebagai pengganti bahan standar umum yang biasanya digunakan untuk bahan pembentuk lapis perkerasan jalan lokal.

Kata Kunci: Evaluasi Context, Input, Process, Product, Peran SDM, Pelibatan dan Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan Jalan

Abstract

This research performed to determine the five (5) aspects that includes the context which contained policies goals and objectives of the program, input aspect, process aspect, product aspect and outcome aspect of accelerated development and preservation of material base local roads in Northern Buton District during the year 2010-2014 in terms of role of human resources in realizing program objectives. The approach used in this study is a qualitative approach by selecting CIPPO evaluation model developed by Stufflebeam. Data and information are captured qualitatively and analyzed quantitatively with the main instruments are questionnaires and confirmed by interviewed with key informants and adequate observation. The result of the study concluded that context aspect has an index with good category, the input aspect has an index with fairly good, the process aspect has an index with fairly good, the product aspect has an index with the good category and the outcome aspect has an index with good category. The most influential component in this study are the role of human resources in the form of innovation, competency, creativity and the role of leader. Public works and spatial planning services department of Northern Buton District in creating changes both in the teams and individuals in the organizations. The study also found that organization culture using social capital and from the program community funding has cooperation with community in form of engagement and empowerment which using local wisdom *Sodamparagigi* means build a cooperation in funding. The program initiates usage of substandard material as substitution of common standard material which is usually used for forming local pavement layers.

Keywords: Context, Input, Process, Product, and Outcome Evaluation, The role of Human resources, community engagement and empowerment, social capital, local road development

A. Pendahuluan

Tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk menghadirkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan di tanah air mampu menghadirkan perubahan serta perkembangan wilayah yang diharapkan mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu aspek yang mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan penyelenggaraan layanan publik dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang mampu mendorong keterbukaan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya yang tinggal jauh dari pusat layanan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 adalah dasar bagi pembentukan Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu kabupaten baru di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara resmi terpisah dari Kabupaten Muna. Hal ini merupakan perwujudan dari cita-cita dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendorong pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan sebagai implementasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan pembangunan sangat didukung dengan terpenuhinya infrastruktur. Infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Salah satu infrastruktur yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan adalah infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, transportasi sungai/laut dan transportasi udara. Pengembangan infrastruktur transportasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan sehingga infrastruktur dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Sebelum Kabupaten Buton Utara berdiri sendiri sebagai daerah otonom, sebagian besar masyarakat mengandalkan transportasi laut. Sarana transportasi laut umumnya tidak dapat melayani transportasi manusia dan komoditi dan hasil alam yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Utara sepanjang tahun.

Keadaan sarana jalan tersebut di awal berdirinya Kabupaten Buton Utara membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam mengembangkan aktivitas perekonomian mereka. Sulitnya dalam mengakses jalur transportasi membuat sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan untuk dapat memperoleh sarana produksi, demikian pula dalam menyalurkan hasil produksi pertanian masyarakat.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buton Utara terkait kondisi sarana jalan ketika awal pemekaran mencatat panjang jalan pada Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 hanya mencapai 300 km saja dimana sebagian besar masih dimana sebagian besar dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat serta masih dengan keadaan jalan kerikil.

Pemerintah Kabupaten Buton Utara sangat menyadari pentingnya membangun sarana transportasi namun terhambat oleh alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah setiap tahunnya terbatas, dibanding dengan keinginan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka akses. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR) merupakan ujung tombak untuk mewujudkan semua rencana percepatan pembukaan akses dengan membangun jalan lokal dan sarana pendukungnya (jembatan, drainase dan duiker), kemudian dioptimalkan perannya dengan menambahkan fungsi Tata Ruang.

Permasalahan bukan hanya terkait keterbatasan dana namun terkait dengan biaya konstruksi pembangunan jalan konvensional dengan menggunakan aspal beton juga tidak murah. Tantangan kondisi wilayah, keterbatasan pendanaan dan mahal biaya pembangunan jalan, mendorong pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk mendapatkan formulasi terbaik untuk mempercepat pembangunan jalan. Salah satu pemikiran yang berkembang adalah bagaimana mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada, baik itu berupa material lokal maupun sumberdaya manusia yang tersedia dilokasi.

Beberapa kondisi alami sebuah kabupaten yang baru berdiri dengan sarana jalan yang masih memprihatinkan, pentingnya sebuah akses jalan dan infrastruktur transportasi bagi perkembangan suatu wilayah dan didorong oleh kemampuan SDM pada instansi terkait melahirkan sebuah gagasan dan program dalam penanganan dan pembangunan jalan dengan memanfaatkan material lokal yang banyak tersedia yang diberi nama Program Percepatan dan Pembangunan Jalan Lokal berbasis material sub standar.

Proses percepatan pembangunan jalan lokal tidak akan berhasil optimal jika tidak didukung oleh pemberdayaan dan melibatkan (partipasi) masyarakat setempat (lokal). Pekerjaan dalam pembangunan jalan dikelompokkan kedalam beberapa jenis kegiatan yang secara teknis memungkinkan untuk dikerjakan masyarakat tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan tersebut. Hasilnya masyarakat terlibat sejak pembersihan jalur jalan, pembuatan parit dan talud jalan, pemasangan bronjong, gorong-gorong (*duiker*) dan pembangunan/pemeliharaan jembatan kayu.

Mulyatiningsih (2011) menyatakan perlunya evaluasi program dilakukan karena bertujuan untuk a) memberikan sumbangan terhadap program yang sedang berjalan sehingga dari evaluasi dapat diketahui apakah program ini dapat dikembangkan di tempat lain, dan b) bahan untuk pengambilan keputusan tentang keberlanjutan suatu program apakah perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Tinjauan terkait Evaluasi CIPPO

Tulung (2014) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu kegiatan yang sistemik dilaksanakan dalam perolehan dan penyajian informasi atau data guna pengambilan keputusan terkait kriteria yang telah diacu atau ditetapkan sebelumnya. Evaluasi sangat erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan terhadap pencapaian proses dan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan. Supranata (2005) sebagai suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis tentang manfaat (*benefit*) akan nilai suatu program atau kebijakan.

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal. Model CIPPO ini disempurnakan dengan menambahkan komponen outcome dari model CIPP. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jaedun (2010) bahwa dalam proses pengevaluasian suatu program juga dibutuhkan evaluasi terkait dampak dari suatu program.

Manajemen SDM dan Pelibatan Masyarakat

Pada dasarnya Manajemen Sumber daya Manusia (MSDM) merupakan suatu sistem sosial dalam sebuah organisasi, yaitu sistem yang isinya manusia beserta aktivitas-aktivitasnya yang

bersifat terbuka, sehingga memungkinkan lingkungan diluar sistem (eksternal) suatu organisasi mempengaruhi kondisi dan perkembangan di dalam sistem (internal) suatu organisasi dan sebaliknya, sistem internal suatu organisasi dapat mempengaruhi situasi dan perkembangan diluar sistem (eksternal). Rivai (2005) menyatakan bahwa sudah menjadi tugas dari manajemen SDM untuk mampu mengelola manusia seaktif dan seefisien mungkin agar diperoleh kumpulan SDM yang merasa puas dan memuaskan.

Kaswan (2012) mendefinisikan Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. MSDM menangani SDM, yaitu orang yang siap, bersedia dan mampu memberikan kontribusi terhadap tujuan *stakeholders*. Soetomo (2008) mengemukakan partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam proses pembangunan yang dimulai dari tahapan pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi masalah serta kebutuhan, tahapan dari perencanaan program, tahapan pelaksanaan program serta dalam tahapan evaluasi terhadap program tersebut.

Pelibatan atau partisipasi masyarakat menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003) hendaknya dilakukan dalam setiap proses / tahapan pembangunan, yaitu; dalam tahap identifikasi permasalahan, proses perencanaan, pelaksanaan proyek pembangunan, evaluasi, mitigasi dan dalam tahap monitoring

Konsep Program Penanganan Jalan Lokal di Kabupaten Buton Utara

Familoni (2004) menyebut infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan. Stiglitz (2006) yang mengemukakan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan tol adalah barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah meskipun infrastruktur ini bukanlah barang publik murni (*impure public good*).

Undang-Undang No 38 Tahun 2007 mendefinisikan jalan sebagai suatu prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun, tidak terbatas pada bentuk jalan dengan permukaan tanah, akan tetapi juga jalan yang melintasi sungai besar/danau/laut, di bawah permukaan tanah dan air (terowongan) dan di atas permukaan tanah (jalan layang), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperhitungkan bagi lalu lintas (kendaraan, orang atau hewan). Undang Undang No. 38 Tahun 2007, tentang jalan, terbagi beberapa struktur jaringan transportasi jalan raya berdasarkan: (i) Jaringan Jalan Primer, (ii) Jaringan Jalan Sekunder, (iii) Jalan menurut fungsi, dan (iv) Jalan menurut peruntukan.

Penanganan Jalan Lokal di Kabupaten Buton Utara dilakukan pada lapis pondasi dan lapis permukaan jalan beraspal buton (bahan substandard) yang akan dirinci sebagai berikut :

1. Lapis pondasi batu kapur yaitu suatu lapisan pada struktur perkerasan jalan yang terletak diantara lapis permukaan dan lapis tanah dasar yang telah disiapkan. Lapis pondasi ini diperuntukan bagi ruas-ruas jalan yang melayani LHR maksimal 400 (lalu lintas rendah kendaraan/hari/2 arah dengan 10% kendaraan berat dan direncanakan untuk lalu lintas <300.000 ESA.
2. *Butur Seal Asbuton* adalah lapis tipis asbuton B 50/30 yang dihampar di atas lapis pondasi atau lapir perkerasan beraspal lama.
3. Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-Asbuton) merupakan lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok, agregat pengunci, dan agregat penutup (khusus untuk lapis permukaan) yang berdegradasi seragam yang dihampar secara terpisah dan diberi ikatan awal dengan aspal cair/aspal emulsi dan diikat oleh Asbuton B 50/30.
4. Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin dalam kemasan yang terdiri dari agregat bergradasi tertentu, asbuton butir, bahan peremaja, dan bahan tambah lain bila diperlukan yang sesuai dengan ketentuan spesifikasi khusus Interim Bina Marga.

B. Metodologi

Pendekatan penelitian yang dilakukan ini yaitu dengan menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuisioner (angket) baik kepada SDM di Dinas PUTR Kabupaten Buton Utara (aspek *context, input, process dan product*) yang berjumlah 51 orang dan masyarakat pengguna jasa jalan (*aspek outcome*) yang berjumlah 60 orang. Penelitian evaluasi pada program pembangunan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara dilakukan pada bulan Januari – Maret 2021.

C. Hasil dan Pembahasan

- Aspek Konteks (*Context*) pada program Penanganan Jalan Lokal
Pengukuran indikator dari Evaluasi Konteks (*context*) mengacu pada teori penetapan tujuan (*goal setting*) yang dikembangkan oleh Latham dan Locker (2006) yang terdiri dari a) *Spesific*, b) *Measurable*, c) *Assignable*, d) *Realistic*, e) *Time Based*.

Tabel 1. Capaian Indikator Aspek *context*

Indikator	Frekuensi					Mean
	SB	B	CB	TB	STB	
Landasan program spesifik dan jelas	5	35	7	4	0	3.8
Landasan program tidak melanggar	6	33	10	2	0	3.8
Tujuan Program terukur dan realistik	7	37	7	0	0	4
Sasaran program dapat tercapai dan tepat waktu	7	37	5	2	0	3.9
Total Mean						3.9

Sumber : Data diolah (2021)

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata skor variabel *pada aspek context* menunjukkan skor **3.9** dimana skor tersebut tergolong kategori baik. Hal ini berarti bahwa pemahaman para pegawai Dinas PUTR Kab. Buton Utara terkait landasan program yang spesifik serta tidak melanggar, tujuan program yang terukur dan realistic serta sasaran program yang dapat tercapai serta tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan termasuk dalam kategori baik.

- Aspek Masukan (*Input*) pada program Penanganan Jalan Lokal
Pengukuran indikator dari Evaluasi Masukan (*Input*) mengacu pada teori dikemukakan oleh Widyoko (2014) yaitu a) Sumber Daya Manusia, b) Sarana dan peralatan pendukung, c) Dana atau anggaran, d) Prosedur dan kebijakan dan aturan terkait yang diperlukan. Adapun tanggapan responden terhadap indikator pada aspek input dijelaskan pada tabel 2 berikut

Tabel 2 Capaian Indikator Aspek Masukan (*input*)

Indikator	Frekuensi					Mean
	SB	B	CB	TB	STB	
Terdapat ketersediaan SDM	4	25	10	8	4	3.3
Terdapat inspirasi pemimpin	4	25	10	8	4	3.3
Terdapat keterlibatan masyarakat dan stakeholder lain	4	24	12	6	5	3.3
Terdapat kelengkapan sarana prasarana	4	24	12	6	5	3.3
Terdapat ketercukupan SDA	3	22	13	7	6	3.2
Terdapat ketercukupan anggaran	4	21	14	6	6	3.2
Kejelasan Standard dan prosedur	4	25	11	6	5	3.3
Total Mean						3.3

Sumber : Data diolah (2021)

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata skor variabel pada aspek masukan (*input*) menunjukkan skor **3.3** dimana skor tersebut tergolong kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa aspek masukan (*input*) dalam program penanganan jalan lokal termasuk dalam kategori cukup baik.

- Aspek Proses (*process*) pada program Penanganan Jalan Lokal
Pengukuran indikator dari Evaluasi Process (*prosess*) mengacu pada evaluasi proses yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014) yaitu a) Peran SDM , b) Peran Sarana dan Prasarana serta peralatan pendukung, c) Peran dana atau anggaran, d) Peran Prosedur dan kebijakan terkait. Adapun tanggapan responden terhadap indikator ini dijelaskan pada tabel 3 berikut

Tabel 3. Capaian Indikator Aspek process

Indikator	Frekuensi					Mean
	SB	B	CB	TB	STB	
Terdapat peran staff dalam pelaksanaan program	5	2 1	8	14	3	3.2
Terdapat peran pemimpin terhadap pelaksanaan program	5	2 4	13	7	2	3.5
Terdapat keterlibatan dan peran dari masyarakat dan mitra kerja terhadap pelaksanaan program	6	2 2	10	10	3	3.3
Terdapat keterkaitan ketercukupan SDA dalam pelaksanaan program ini	3	2 3	15	7	3	3.3
Keterkaitan sarana prasarana dalam pelaksanaan program	4	2 2	15	8	2	3.4
Keterkaitan dana / anggaran yang cukup dalam pelaksanaan program	4	2 5	9	10	3	3.3
Terdapat prosedur yang jelas dalam pelaksanaan program	4	2 5	9	10	3	3.3
Total Mean						3.3

Sumber : Data diolah (2021)

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata skor variabel pada aspek proses (*process*) menunjukkan skor **3.3** dimana skor tersebut tergolong kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa aspek proses termasuk dalam kategori cukup baik.

4. Aspek Produk pada program Penanganan Jalan Lokal
Pengukuran indikator aspek ini mengacu pada teori efektifitas program yang dikembangkan oleh Barnard dalam Prawirosentono (2008) yang terdiri dari a) Kejelasan tujuan program, b) Perumusan kebijakan program yang mantap, c) Efektifitas tujuan program, d) Efektifitas sasaran program. Adapun tanggapan responden terhadap indikator ini dijelaskan pada tabel 4 berikut

Tabel 4. Capaian Indikator Aspek product

Indikator	Frekuensi					Mean
	SB	B	N	TB	STB	
Tahu tujuan program bermanfaat bagi daerah dan masyarakat	6	25	15	4	1	3.6
Tahu hasil program sudah sesuai dengan yang tujuan yang direncanakan	6	27	13	5	0	3.6
Tahu hasil program sudah sesuai dengan sasaran	5	25	11	7	3	3.4
Total Mean						3.6

Sumber : Data diolah (2021)

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata skor variabel pada aspek hasil (*product*) menunjukkan skor **3.6** dimana skor tersebut tergolong kategori baik. Hal ini berarti bahwa pemahaman para pegawai Dinas PUTR Kab. Buton Utara terkait tercapainya target dengan rencana termasuk dalam kategori baik.

5. Aspek Dampak (*Outcome*) pada program Penanganan Jalan Lokal
Pengukuran indikator dari Evaluasi outcome (dampak dan pengaruh) mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Laterner dan Levine (1993) yang melihat dari 5 (lima) indikator yaitu a) Baik tidaknya layanan, b) produktivitas, c) responsibilitas, d)akuntabilitas, e) responsivitas. Namun dalam penelitian ini hanya mengacu pada dua indikator aja yaitu a) baik tidaknya layanan serta b) produktivitas. Adapun responden pada pertanyaan seputar aspek dampak (*outcome*) adalah masyarakat pengguna jalan di Kab. Buton Utara yang berjumlah 60 orang. Adapun tanggapan responden terhadap indikator pada aspek dampak (*outcome*) dijelaskan pada tabel 5 berikut

Tabel 5. Capaian Indikator Aspek *outcome*

Indikator	Frekuensi					Mean
	SB	B	CB	TB	STB	
Kebaikan program karena mendorong pemanfaatan maksimal material lokal	10	30	10	7	3	3.6
Kebaikan program karena mampu membuka akses jalan dari desa ke desa dan dari desa ke kota lebih lancar	10	45	4	1	0	4
Kebaikan program mampu mengubah pola perjalanan dari laut menjadi darat	8	48	3	0	1	4
Kebaikan program mampu menurunkan biaya perjalanan menjadi lebih murah dan efisien.	8	48	3	0	1	4
Kebaikan program mampu meningkatkan pendapatan	6	40	8	6	0	3.8
Mampu meningkatkan produktifitas sehari-hari	8	42	5	3	2	3.9
Total Mean						3.9

Sumber : Data diolah (2021)

Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata skor variabel pada aspek dampak (*outcome*) menunjukkan skor **3.9** dimana skor tersebut tergolong kategori baik. Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasan masyarakat pengguna jalan di Kab. Buton Utara yang mengacu pada teori Laterner dan Levine (1993) termasuk dalam kategori baik.

Pembahasan

1. Aspek Konteks (*context*)

Temuan evaluasi pada analisis kebijakan, program dan sasaran program penanganan jalan lokal yang menyatakan bahwa program ini sesuai dengan Kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi, dan Kebijakan Kabupaten Buton Utara. Hal ini digambarkan dengan kesesuaian antara Permen PU No.35/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Asbuton, Spesifikasi khusus interim Kementerian PU Bidang Jalan dan Jembatan, Surat Edaran Menteri PU No. 11/SE/M/2013 tentang Butur Seal Asbuton, Surat Edaran No. 09/SE/2013 tentang LPMA Asbuton.

Sasaran Program penanganan jalan lokal yang dalam Renstra menetapkan bahwa semua desa di daratan Pulau Buton Utara dapat diakses dengan kendaraan roda empat, baik antar desa maupun desa ke kota telah terwujud. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dari aspek konteks telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang perlu dilakukan yakni landasan kebijakan khususnya tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah dicapai dengan indeks kategori baik.

2. Aspek Masukan (*Input*)

Komponen evaluasi masukan (*input*) ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan (*what should be done*). Deskripsi analisis kuantitatif pada hasil evaluasi input memberikan nilai kategori cukup baik dengan perbaikan dalam ketersediaan SDM, inspirasi pemimpin, keterlibatan masyarakat, kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan Sumber Daya Alam, ketercukupan Anggaran dan kejelasan standard dan prosedur dalam program penanganan jalan lokal.

3. Aspek Proses (*process*)

Hasil evaluasi input otomatis sangat mempengaruhi komponen evaluasi proses dan berkonsekuensi logis secara koheren diantara ketiganya, yaitu evaluasi konteks, input, dan proses itu sendiri. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi input yang berkualitas oleh peralatan kerja yang memadai, peran SDM yang optimal, peran dari seorang pemimpin dan keterlibatan masyarakat setempat serta ketercukupan SDM dan anggaran akan sangat mempengaruhi aspek proses dalam program penanganan jalan local yang diinisiasi oleh Dinas PUTR Kab. Buton Utara.

4. Aspek Hasil (*product*)

Pengaruh proses pada aspek *product* lebih kuat, dan berimplikasi langsung pada produk (hasil) kegiatan input dan proses dari program penanganan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara. Hasil analisis kuantitatif pada aspek produk memperlihatkan bahwa SDM di

Dinas PUTR Kabupaten Buton Utara sangat menyadari efektifitas program penanganan jalan lokal yang berguna bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Buton Utara karena hasilnya sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara.

Biaya pembangunan/pemeliharaan jalan dapat dihemat tanpa mengorbankan volume dan kualitas konstruksi jalan. Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian pada evaluasi produk tersebut dapat dikatakan Pogram penanganan jalan lokal telah memenuhi harapan dan telah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan program penanganan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara.

5. Aspek dampak (*outcome*)

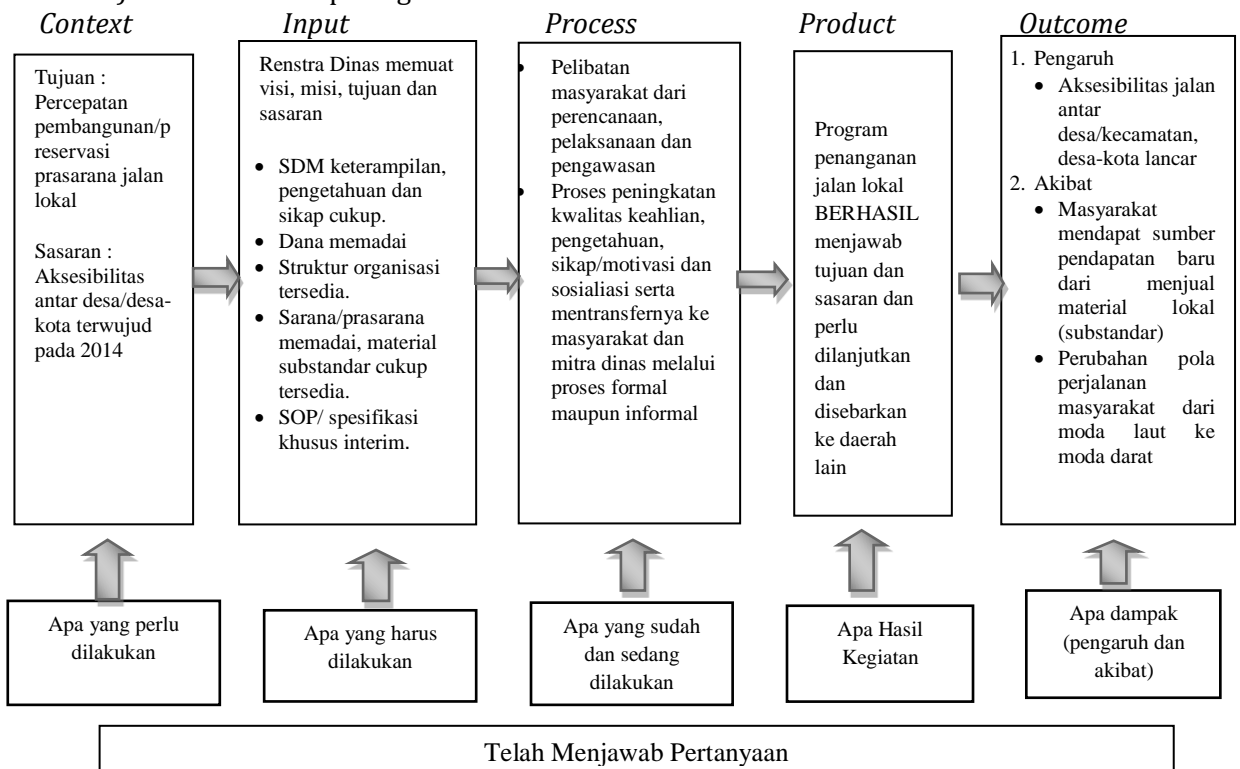
Hasil evaluasi dampak (pengaruh) dari Program penanganan jalan lokal ini antara lain ditemukan bahwa:

- a. Kebaikan dari program ini karena mampu mendorong pemanfaatan maksimal material lokal untuk pembangunan jalan lokal.
- b. Kebaikan dari program ini karena mampu membuka aksesibilitas jalan baik dari desa ke desa dan dari desa ke kota
- c. Kebaikan dari program ini karena mampu mengubah pola perjalanan dari moda laut ke moda darat.
- d. Kebaikan program ini karena mampu menurunkan biaya perjalanan menjadi lebih murah dan efektif.
- e. Kebaikan dari program ini karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat
- f. Program ini mampu meningkatkan produktifitas kerja bagi masyarakat.

Hasil temuan penelitian ini menegaskan betapa pentingnya jalan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Todaro (2006) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

6. Keterkaitan Evaluasi CIPPO

Stufflebeam dalam Wirawan (2015) mengatakan bahwa model evaluasi CIPPO bersifat linear, artinya evaluasi *input* harus didahului oleh evaluasi konteks, evaluasi proses harus didahului oleh evaluasi *input*. Dalam evaluasi program penanganan jalan lokal ini secara sumatif telah terjadi keterkaitan langsung antar komponen evaluasi *Context*, *Input*, *Process*, *Product* dan *Outcome*. Model Keterkaitan dengan evaluasi CIPPO (*Context* hingga *Outcome*) akan diuraikan pada gambar berikut

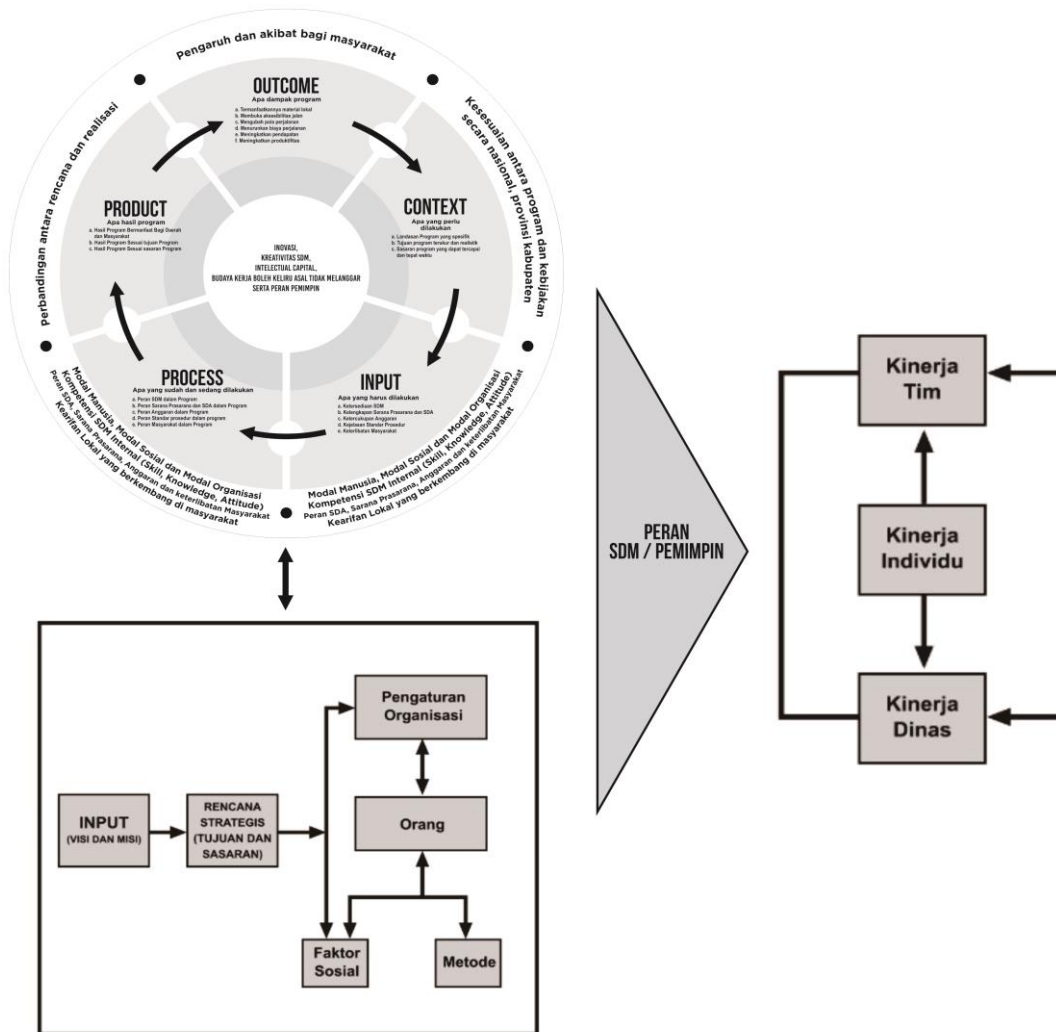


Gambar 1. Keterkaitan Evaluasi Komponen CIPPO program penanganan jalan lokal
 Sumber : Diolah Tahun 2021

Model Teoretis Proyek Pembangunan Jalan

Sebuah model teoretis mengenai proyek pembangunan jalan di Kabupaten Buton utara yang dibangun dari beberapa teori terkait Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) serta alat evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Evaluasi CIPPO (*Context, Input, Process, Product dan Outcome*). Model penelitian ini berfokus pada pada peran Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam mencapai tujuan bersama yang berfokus pada lahirnya inovasi dan krerativitas SDM dalam organisasi yang menjamin kinerja pribadi, kinerja tim serta kinerja organisasi (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara) sehingga menghasilkan kinerja dinas berupa outcome program penanganan jalan lokal yang telah dicapai dengan baik serta mampu memberikan pengaruh yang baik terhadap pemanfaatan secara maksimal material lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Buton Utara, merubah pola perjalanan masyarakat di Kabupaten Buton Utara dari dominan dalam pemanfaatan moda laut menjadi menggunakan moda darat dan meningkatkan produktifitas kerja masyarakat di Kabupaten Buton Utara.

Adapun model teoretis penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar berikut



Gambar 2. Model Teoretis Program penanganan jalan lokal di Kab. Buton Utara (Data Diolah : 2021)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait evaluasi program penanganan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Konteks (*context*)

Kebijakan program yang mencakup tujuan dan sasaran program penanganan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat (nasional), kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kategori baik.

2. Aspek Masukan (*input*)
Kompetensi SDM di Dinas PUTR Kab. Buton Utara sangat memahami indikator aspek masukan (*input*) dalam penelitian ini dan memiliki kategori cukup baik.
3. Aspek Proses (*process*)
Kompetensi SDM dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan program penanganan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara telah berhasil dengan kategori cukup baik.
4. Aspek Hasil (*product*)
Hasil yang di capai oleh program penanganan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara telah memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUTR Kabupaten Buton Utara dengan kategori baik.
5. Aspek Dampak (*outcome*)
Dampak yang dirasakan telah sesuai dengan harapan masyarakat dari program penanganan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara berhasil dengan kategori baik yang bisa dilihat dari berbagai aspek yaitu a) mendorong pemanfaatan maksimal material lokal untuk pembangunan jalan, b) membuka aksesibilitas jalan di wilayah Kabupaten Buton Utara, c) mengubah pola perjalanan dari moda laut menjadi moda darat, d) menurunkan biaya transportasi menjadi lebih murah dan efektif, e) meningkatkan pendapatan masyarakat serta f) meningkatnya produktifitas jalan.
6. Tercapainya lima aspek evaluasi itu banyak dipengaruhi oleh emelen sebagai berikut :
 - a. Peran SDM yang digambarkan oleh kompetensi, inovasi dan kreativitas SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buton Utara serta peran pimpinan dalam mengorganisir SDM di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta didukung kinerja individu serta kinerja tim sehingga berdampak dan berkontribusi pada kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara yang terlihat dari pencapaian tujuan dan sasaran dari program penanganan jalan lokal.
 - b. Strategi pelibatan (partisipasi) masyarakat serta menggunakan pendekatan dalam kearifan lokal yang berkembang di wilayah Kabupaten Buton Utara dalam penyelesaian program penanganan jalan lokal.
 - c. Penggunaan material lokal (substandar) sebagai bahan substitusi material berstandar (konvensional) dalam program penanganan jalan lokal.

D. Referensi

- Canning, D., & Pedroni. P. (2004). *The Effect of Infrastructure on Long Run Economic Growth*. JEL Classification.
- Familoni, K. A. (2004). *The role of economic and social infrastructure in Economic Development : A Global View*.
- Fitzpatrick, et, al. (2007). *Program Evaluation: Alternative & Approaches and Practical : Third Edition*, New York: Pearson Education Inc.
- Jaedun, A. (2010). *Metode Penelitian Evaluasi Program. Evaluasi kebijakan dan Evaluasi Program*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kaswan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Kinicki dan Kreitner. (2008). *Organizational Behavior: Key Concepts, Skill & Best Practices*. New York.
- Laporan Akhir. *Penelitian Studi Evaluasi Percepatan Pembangunan Jalan Lokal di Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara*, (2015).
- Latham, GP dan Locker, E. A. (2006). *New directions in Goal Setting Theory*. Association of Psychological Science. Vol 15. No 5, 265 – 268.
- Laterner, A. R., & Levine, I. E. (1993). *Teknik memimpin pegawai dan Pekerja*. Jakarta : Aksara baru
- LP3ES, (2009). *Studi Evaluasi program Pengembangan Masyarakat di Bidang Infrastruktur Pedesaan*, Jakarta,
- Mulyatiningsih, E, (2011). *Riset Terapan Bidang Pendidikan & Teknik* Yogyakarta: UNY Press.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara No. 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara.
- Prawirosentono, Suyadi. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara, Tahun 2010 – 2015. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 – 2014*
- Rivai, V. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Rajagrafingo Persada.
- Soetomo. (2008). *Strategi – strategi pembangunan masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Stufflebeam, Daniel I.dan Antony. I. Shienkfield. (1986). *Systematic Evaluation: A Self-instructional Guide to Theory and Practice*, Netherlands: Kluwer Nijhof Publishing
- Stufflebeam, D. L. et.al. (2000). *Evaluation Models Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*. New York; Kluwer Academic Publishers,
- Stufflebeam, Daniel I.dan Chis L.S Coryn. (2014). *Organizational Evaluation Theory, Models & Applications*. New York; Kluwer Nijhof Publishing.
- Stiglitz, Joseph. (2006). *Making Globalization work*. Bandung : Penerbit Mizan Pustaka.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Supranata, S. (2005). *Panduan Penulisan Tes Tertulis, Implementasi Kurikulum* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/SE/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Lapis Tipis Asbuton Butur (Seal)
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/SE/M/2013 tentang Pedoman Spesifikasi Teknis Campuran Beraspal Dengan Asbuton
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/SE/M/2013 tentang Pedoman Spesifikasi Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-ASBUTON).
- Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* . Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Tulung, J. M. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Balai Diklat Keagamaan Manado*. Jurnal Acta Diurna Volume III No 3 Tahun 2014.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara
- Undang-Undang No 38 Tahun 2007 tentang Jalan
- Widoyoko, Eko Putro. (2014). *Evaluasi Program Pembelajaran : Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Yamin, R. Anwar. Prafianto, Willy. (2015). *Butur Seal Suatu Alternatif Lapis Penutup Jalan Berlalu Lintas Rendah*. Bandung: Laporan Penelitian Jalan Dan Jembatan. Puslitbang Dan Jembatan.